

## Makalah Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan

Pengertian dan Batas-batas Pengelolaan Wilayah Pesisir Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan\_ Perencanaan Wilayah Pesisir\_Khurotul A'yun KULIAH PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR (25/02/2021) MMPi5104 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut - Siklus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu MMPi5104 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut - Sumberdaya Non Hayati \u0026 Lingkungan Pesisir \u0026 Laut MMPi5104 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut - Pembelajaran dan Praktek Pengelolaan Pesisir Terpadu Konsep Dasar Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut MMPi5104 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut - Perencanaan dan Strategi Pengelolaan Pesisir \u0026 Laut 2. PIK - Manajemen Pesisir dan Laut - Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu MMPi5104 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut - Sosial Ekonomi Wilayah Pesisir \u0026 Laut KONSEP PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU 1 Kuliah Tapi Podcast - Pengelolaan Wilayah Pesisir Minggu 1 - Mengapa Perlu PWP? MMPi5104 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut - Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU Isu Pengelolaan Wilayah Pesisir di Negara Asia Selatan Permodelan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara Terpadu yang Berbasis Masyarakat Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan KULIAH PBL MINGGU 8 - PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

Ekonomi Sumberdaya Pesisir yang Tercemar

Akuakultur dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENGEMBANGAN UMKM WILAYAH PESISIR

The Official Journal of SEAMEO.

MENULIS ETNOGRAFI: Belajar Menulis Tentang Kehidupan Sosial Budaya Berbagai Etnis

Aspek nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Arahan Pengembangan Kawasan

POTENSI EKOLOGIS DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DI WILAYAH PESISIR

MANAJEMEN UMKM MODEL MANAJEMEN SENTRA INDUSTRI UMKM PADA WILAYAH PESISIR JAWA TIMUR

belajar dari kawasan Sungai Kuin Banjarmasin

Prosiding Seminar Nasional MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM MENUJU TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN LESTARI

Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

Pengembangan Wilayah

Pengembangan Perikanan, Kelautan dan Maritim untuk Kesejahteraan Rakyat Volume I

Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Ekosistem Pantai dan Pulau-Pulau Kecil dalam Konteks Negara Kepulauan, Yogyakarta, 2 September 2000

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah

Dari Hutan Sampai Laut: Mendorong Pengelolaan Berbasis Masyarakat Lokal

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Konsep dan Teori)

Prosiding Konperensi Nasional III, 2002, Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia

Pembangunan wilayah

*Makalah Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan*

*OMB No. 9678869503405 edited by*

### **BRADLEY DAISY**

**Ekonomi Sumberdaya Pesisir yang Tercemar** Springer Nature

Judul : PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI : Studi di Kawasan DAS Kabupaten Langkat Penulis : Tamaulina Br. Sembiring, S. H., M. Hum., Ph.D  
Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 117 Halaman No ISBN : 978-623-5687-89-6 SINOPSIS Buku ini membahas Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Studi di Kawasan DAS Kabupaten Langkat). Buku ini penulis kontribusikan untuk Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia khususnya di Kabupaten Langkat. Buku ini terdiri dari lima bab. Bab pertama membahas tentang Pendahuluan. Bab kedua membahas tentang Kawasan Daerah Aliran Sempadan Sungai. Bab ketiga membahas tentang Masalah Lingkungan Hidup Di Kawasan DAS di Kabupaten Langkat. Bab keempat membahas tentang Penyebab Kegagalan Pengelolaan Das Di Kabupaten Langkat yang meliputi, Lemahnya penegakan Hukum dalam pengelolaan Lingkungan Hidup di kawasan DAS, Faktor Kultur (Budaya) Hukum masyarakat di Kabupaten Langkat, Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat akan Pentingnya Ekosistem Kawasan DAS, Belum Adanya Peraturan daerah Kabupaten Langkat tentang alam sekitar (lingkungan hidup) dan ekosistem DAS dan Masalah Yang dihadapi Pemerintah dan Pengusaha yang ada di Kabupaten Langkat. Bab kelima membahas tentang Pengaturan Konservasi DAS di Kabupaten Langkat.

*Akuakultur dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan* Penerbit Andi

Buku ini tersusun tentu bukan dari usaha penulis seorang, namun mengajak mahasiswa untuk berkontribusi dengan melakukan strategi pendampingan dikelas dan disajikan berdasarkan hasil mini research yang dilakukan. Dalam mendapatkan data dan pengalaman langsung dari lapangan merupakan catatan etnografi yang dituliskan dan merupakan teknik dalam menulis etnografi. Proses enkulturasi penuh sangat dibutuhkan dalam menulis etnografi agar tulisan dalam buku ini bisa menjadi lebih baik dan terarah.

**Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan** Yayasan Kita Menulis

Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa wilayah pesisir Indonesia memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulannya dari segi fisik, geografis, dan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Potensi wilayah pesisir tersebut berpengaruh terhadap peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, jumlah penduduk di wilayah pesisir, dan pemanfaatan lain yang diperlukan bagi pembangunan. Sumber daya alam di wilayah pesisir sangat penting bagi perekonomian dan pembangunan yang nantinya harus dikelola secara terpadu dan berkelanjutan.

Deepublish

Buku ini menjelaskan bagaimana arah dan lingkup kajian ideologi dalam kajian media. Isinya mengemukakan penjelasan berbagai pemikiran yang berkembang perihal keterkaitan antara media dan masyarakat dan faktor ideologi sebagai latar belakang permasalahan isi media. Kehadiran buku ini sangat penting terutama untuk memahami bagaimana status dan posisi media dalam konstelasi dan kontestasi sosial, ekonomi dan politik. Buku ini tak hanya dapat dibaca oleh mahasiswa dari program studi ilmu komunikasi atau juga dari rumpun ilmu sosial lainnya, melainkan juga dapat dibaca oleh para pemerhati dan penggiat kajian media serta pelaku media itu sendiri.

*STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENGEMBANGAN UMKM WILAYAH PESISIR* Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Regional development from economic, social, and environment aspects in Indonesia.

*The Official Journal of SEAMEO.* LKIS PELANGI AKSARA

Penulisan buku ini merupakan hasil dari pengembangan riset penulis tentang keberadaan keberadaan hutan mangrove yang berada di tengah kota dan keistimewaan lainnya pengelolaan mangrove diprakarasai dan dikelola oleh masyarakat (bottom up participation) dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi ikon dan ekowisata unggulan Kota Balikpapan. Namun demikian saat ini Pemerintah Kota Balikpapan maupun masyarakat Kota Balikpapan masih belum menyadari dan tidak menjadikan prioritas akan potensi (Nilai Langsung maupun Nilai Tidak Langsung/Jasa Lingkungan) dari hutan mangrove di Mangrove Center Graha Indah (MCGI) ini dan cenderung beranggapan “biasa” karena belum sadar dan mengerti pentingnya keberadaan mangrove ini serta keberlanjutan dalam pengelolaannya. Dalam buku ini diurai menjadi 7 Bab Yakni; Bab 1 Pengelolaan Hutan Mangrove: Sebuah Pengantar; Bab 2 Mangrove Dan Pengelolaan Berkelanjutan; Bab 3 Konsep Pengelolaan Berkelanjutan Hutan Mangrove Center Graha Indah City Kota Balikpapan; Bab 4 Profil Wilayah Kota Balikpapan; Bab 5 Letak Geografis Dan Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Hutan Mangrove Center Graha Indah Kota Balikpapan; Bab 6 Rangkaian Proses Pengelolaan Hutan Mangrove, Dan; Bab 7 Kerapatan Sebaran Mangrove Dan Pembangunan Skenario Berkelanjutan Pengelolaan Hutan Mangrove Center Graha Indah Kota Balikpapan.

**MENULIS ETNOGRAFI: Belajar Menulis Tentang Kehidupan Sosial Budaya Berbagai Etnis** PT Penerbit IPB Press

Konflik Sosial Kemiskinan, keter-belakangan masyarakat nelayan, serta kerusakan lingkungan pesisir dan laut merupakan dampak dari kebijakan pembangunan yang selama ini berorientasi ke daratan. Sekalipun sejak tiga dasa warsa terakhir ini, pemerintah menggulirkan kebijakan modernisasi perikanan (blue revolution) untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, hasil yang dicapai justru sebaliknya. Secara umum, nelayan di berbagai sudut negeri ini masih terperosok dalam perangkap kerentanan sosial-ekonomi yang berkepanjangan.

*Aspek nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Evidence-Based Policy: dari Riset ke Kebijakan* Volume II Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan

Buku ini memberikan gambaran bagaimana seharusnya melakukan pola pemanfaatan sumberdaya akuakultur secara bertanggungjawab dan berkelanjutan dalam kerangka implementasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Buku ini terdiri dari 9 (sembilan) Bagian, dimana substansi diambil dari gagasan pribadi penulis berdasarkan rujukan dari berbagai sumber ilmiah (nasional dan internasional), isuisu terbaru dan fakta-fakta di lapangan

**Arahan Pengembangan Kawasan** Deepublish

Buku Rekayasa Sosial ini disusun dengan maksud agar para mahasiswa dapat dengan mudah mengetahui dan memahami masalah pemberdayaan masyarakat di desa yang terkait dengan pengembangan UMKM khususnya yang berada disekitar wilayah pesisir pantai. Pemberdayaan saat ini telah menjadi Program nasional melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), Sehingga semua SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) memiliki program Pemberdayaan Masyarakat. Bahkan diseluruh Provinsi dan kabupaten/kota perlu dibentuk instansi khusus yang bernama Badan/kantor Pemberdayaan Masyarakat. Bahkan di dalam Struktur pemerintah desa/kelurahan juga dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) harus disinergikan untuk mencapai tujuan sesuai dengan program yang dicanangkan. Oleh sebab itu buku ini diterbitkan dengan harapan untuk dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang membutuhkan, baik Mahasiswa, Fasilitator, aparat desa/ kelurahan, pemerhati pemberdayaan masyarakat desa kebijakan public.

**POTENSI EKOLOGIS DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DI WILAYAH PESISIR** Media Nusa Creative (MNC Publishing)

Economic and political conditions in Indonesia; collection of articles.

### **MANAJEMEN UMKM MODEL MANAJEMEN SENTRA INDUSTRI UMKM PADA WILAYAH PESISIR JAWA TIMUR**

UGM PRESS

ZEE merupakan perkembangan hukum internasional dalam rangka mengatur kelautan yang berkaitan dengan pemanfaatan ekonomis sumber daya hayati khususnya sumber daya ikan bagi kemakmuran rakyat negara pantai dan kepentingan negara lain yang terkait, dengan tetap memerhatikan faktor pelestarian dan keberlanjutannya. Indonesia tergolong sebagai negara maritim terbesar di dunia karena memiliki laut yang luas sehingga Indonesia dikenal dunia sebagai negara maritim yang memiliki potensi besar di bidang kelautan, khususnya di ZEE-nya yang luasnya mencapai 2,7 km2. Pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, mengharuskan Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan, tanpa mengesampingkan kepentingan negara lain. Hal ini menyebabkan Indonesia harus segera berbenah dan menyelaraskan aturan-aturan terkait. Buku ini mencoba menganalisis hak, kewajiban, dan kewenangan yang dimiliki oleh Indonesia terkait dengan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia bagi kesejahteraan rakyatnya, dan pemanfaatan surplus oleh negara lain. Selanjutnya, kasus-kasus yang disajikan dalam buku ini diyakini dapat terjadi kembali dalam bentuk yang berbeda sehingga perlu dipersiapkan langkah-langkah preventif.

belajar dari kawasan Sungai Kuin Banjarmasin Sinar Grafika

Ide Penulisan Buku Program-Program Pemberdayaan Masyarakat di Sulawesi Tengah: Membangun Paradigma Berbasis Modal dan Paradigma Berbasis Nilai terlontarkan pertama kali dari ngobrol penulis dengan Mas Yanto panggilan akrab Ahmad Sriyanto, bung Acip panggilan akrab Tasrief Siara dalam perjalanan Luwuk-Palu di Tahun 2004 tepatnya antara desa Salodik dan Sabo di pagi hari yang cerah. Penulis ingat betul, ketika topik sampai pada pembicaraan kegagalan dan keberhasilan beberapa program yang pernah digeluti oleh kedua kawan tersebut, baik sebagai konsultan maupun jurnalis pemantau yaitu Sulawesi Agriculture Area And Development Project (SAADP) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), kedua kawan tersebut melontarkan omongan pembuka mengapa di Bualemo, Ampana Tete, Ampana Kota, Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD)-SAADP dapat berhasil dan mengapa di Pamona Selatan, Balantak, Lamala kurang berhasil? Mengapa pula PPK dapat berhasil dalam revolving fund di wilayah Banawa saat bung Acip memantau? Penulis melontarkan jawaban walaupun belum tentu mengena yaitu boleh jadi masyarakatnya mau berubah dan ingin mengubah nasibnya seperti di dalam Surat AR-Rad Ayat 11 “Allah Tidak Akan Mengubah Nasib Suatu Kaum Apabila Kaum Tersebut Tidak Mengubah Nasibnya”, atau karena kondisi alamnya memang membuat orang harus berubah karena tidak ada yang dapat diandalkan seperti di Mambo yang menyebabkan penduduknya harus sekolah karena dorongan alam. Mungkin saja karena di Bualemo etnisnya dominan transmigran asal Jawa yang mempunyai etos kerja yang tinggi, sedangkan di Lamala dan Pamona Selatan adalah dominan penduduk asli yang menguasai aset atas tanah, dimanja alam, kemungkinan tidak pernah berpikir untuk dioptimalkan. Begitu banyak jawaban-jawaban yang muncul, tetapi belum memuaskan penulis untuk menggalinya lagi muncul pula pertanyaan apakah indikator keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat? Mas Yanto dan Bung Acip sepakat menjawab “itu dilihat dari segi pengembalian dana bergulir karena dana bergulir merupakan dana abadi desa atau macetnya perguliran dana”. Jadi ukuran keberhasilan dilihat dari revolving fund yang terjadi di masyarakat seperti yang dianalisis melalui pemantauannya di Kecamatan Banawa oleh bung Acip. Program-Program Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Tengah Membangun Paradigma Berbasis Modal Dan Paradigma Berbasis Nilai ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak\*

**Prosiding Seminar Nasional MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM MENUJU TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN LESTARI** PT Penerbit IPB Press

Buku “Pengembangan Perikanan, Kelautan dan Maritim untuk Kesejahteraan Rakyat” merupakan hasil pemikiran dan gagasan dari para Guru Besar Institut Pertanian Bogor. Terdapat 39 artikel hasil penelitian, pemikiran dan pengalaman ilmiah yang terkumpul. Oleh karena itu, buku ini diterbitkan menjadi dua volume. Volume 1 memuat pemikiran dan gagasan yang mencakup: Arah pengembangan perikanan, kelautan dan maritim; Karakteristik ekosistem pesisir dan laut; Aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat pesisir; serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kelautan. Tulisan-tulisan Guru Besar IPB pada buku ini diharapkan dapat menjadi sumbang karya pemikiran bagi para pembaca, khususnya pemerintah dan pengambil keputusan serta pihak terkait yang bertanggung jawab mengelola kebaharian nusantara.

### **PENGATURAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH**

Guepedia

Pesisir merupakan sumberdaya akses terbuka yang tidak memiliki status kepemilikan, sehingga tidak ada aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban. Dengan demikian kelembagaan (aturan main rule of the game) dalam pemanfaatan wilayah pesisir sulit ditegakkan (enforce ability). Kerusakan lingkungan pesisir dan laut ini telah berdampak pada penurunan dan kerugian pada aspek ekonomi, baik untuk masa saat ini maupun di masa yang akan datang. Buku ini mengulas dampak kerusakan lingkungan terhadap perekonomian masyarakat pesisir dan konflik yang terjadi. Analisis yang di dasarkan dari hasil riset Penulis, menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Buku ini secara gamblang menjelaskan bagaimana kerusakan wilayah pesisir telah berdampak pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat.

**Pengembangan Wilayah** Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Dalam kajian yang komprehensif ini, dipaparkan penjelasan yang mendalam dan unik mengenai Semberdaya pesisir. Dengan diperkuat dengan teknologi, pihak-pihak yang bermodal mampu mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan sehingga terjadi hukum rimba (siapa yang kuat, dia yang menang) dan daya produksi alamiah menjadi terganggu. Implikasi-implikasi lanjutan dari fenomena tersebut menyebabkan pula terjadinya degradasi lingkungan pesisir dan laut. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan produktivitas ternyata telah menimbulkan kerusakan yang serius terhadap lingkungan . Dinamika Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak

### **PENGEMBANGAN PERIKANAN, KELAUTAN DAN MARITIM UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT VOLUME I**

PT. RajaGrafindo Persada

Kepulauan Karimunjawa memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pariwisata. Keanekaragaman biodiversitas menjadi faktor utama dalam pengembangan kawasan pariwisata. Biodiversitas berbagai jenis terumbu karang, lamun, dan mangrove yang terdapat di Kepulauan Karimunjawa mengindikasikan bahwa Kepulauan Karimunjawa mampu memberikan nuansa baru dalam berwisata di pulau kecil. Indikator keberhasilan pembangunan di Kepulauan Karimunjawa dapat diketahui melalui rona lingkungan yang baik dan menarik, meliputi lingkungan biotik, abiotik, dan kultur. Identifikasi terkait biodiversitas laut maupun darat di Kepulauan Karimunjawa menjadi hal utama yang harus dilakukan dalam pengelolaan kegiatan pariwisata. Daya tarik utama berada pada keberagaman ekosistem yang dimiliki oleh Kepulauan Karimunjawa. Berbagai jenis wisata yang berkembang ialah kegiatan wisata bahari dan wisata pantai. Wisata bahari meliputi kegiatan snorkeling dan menyelam untuk melihat berbagai biota bawah laut, seperti berbagai jenis terumbu karang dan ikan. Kegiatan wisata pantai meliputi rekreasi pantai dan berperahu untuk melihat keindahan pemandangan di pantai, seperti sunset di sore hari. Pembangunan kegiatan ekowisata di Kepulauan Karimunjawa tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang muncul, yaitu pemanfaatan sumber daya alam pesisir yang semakin tinggi sehingga menimbulkan degradasi lingkungan pesisir. Degradasi lingkungan terjadi karena pemanfaatan sumber daya yang melebihi daya dukungnya. Analisis daya dukung digunakan sebagai pembatas dalam pemanfaatan sumber daya agar tidak merusak lingkungan dan kelestariannya tetap terjaga. Pengembangan berbagai objek wisata di Kepulauan Karimunjawa harus memperhatikan berbagai parameter fisik agar sesuai dengan kemampuan lahan dan tidak melampaui daya dukung lingkungannya. Konsep daya dukung, yaitu kemampuan suatu kawasan wisata untuk menerima jumlah maksimum pengunjung sehingga dalam pengembangan objek wisata tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Analisis daya dukung terhadap akomodasi dan kondisi pangan menjadi penting akibat tren pengunjung Kepulauan Karimunjawa yang semakin tinggi.

**Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Ekosistem Pantai dan Pulau-Pulau Kecil dalam Konteks Negara Kepulauan, Yogyakarta, 2 September 2000** PT. RajaGrafindo Persada

Kami berharap bahwa berbagai temuan hasil riset yang disajikan dalam buku ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai penelitian di masa yang akan datang. Adapun hasil-hasil penelitian yang telah siap diimplementasikan, baik dalam dunia industri, rumah tangga, ataupun dalam perumusan kebijakan publik, kami harapkan dapat menyumbangkan nilai maslahat yang besar bagi masyarakat luas. Dalam konteks ini, kami sangat mendorong komunikasi dan kerja sama yang nyata antara para akademisi, pelaku bisnis, dan penyusun kebijakan publik yang dikenal sebagai segi tiga ABG (academicia, business, and government). Tanpa komunikasi dan kerja sama yang baik di antara tiga kelompok pelaku tersebut mustahil dihasilkan nilai tambah yang bermanfaat besar bagi masyarakat luas.

### **PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH**

Kencana Ratu Pualam (KRP) Press

Management of coastal ecology and small islands in Indonesia.

### **PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH**

UGM PRESS

Poin penting yang disajikan dalam buku ini terangkum dalam 7 (tujuh) bagian: Bab “Pendahuluan”: Kondisi wilayah pesisir Indonesia, Konsep kebijakan publik pesisir, Implementasi kebijakan daerah pesisir dan pengelolaan wilayah pesisir (PWP), dan Pembangunan berkelanjutan PWP; Bab “Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir”; Bab “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir”; Bab “Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu: Pemanfaatan Ruang, Sumber Daya, dan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir”; Bab “Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pengelolaan Pesisir Terpadu: Pelajaran Kebijakan dari Brasil dan Indonesia”; Bab “Mengkritisi Kebijakan Wilayah Pesisir”; dan “Metodologi Penelitian Wilayah Pesisir”. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Dari Hutan Sampai Laut: Mendorong Pengelolaan Berbasis Masyarakat Lokal Prenada Media

Buku ini membahas tentang aspek ekologis dan sosial ekonomis ekosistem mangrove, metode analisis pengelolaan ekosistem mangrove yang disertai dengan contoh kasus, dan berbagai bentuk pemanfaatan ekosistem mangrove secara terpadu dan berkelanjutan.

Related with Makalah Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan:

© [Makalah Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan How Long Is Skywest Pilot Training](#)

© [Makalah Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan How Many Languages Does Barron Trump Speak](#)

© [Makalah Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan How Many Episodes In Chemistry Of Death](#)